

**PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIVONIS PIDANA
DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

TESIS

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum*



OLEH:

**SARI DEWI
NIM. 1620112002**

KOMISI PEMBIMBING :

**Dr. KHAIRANI, SH, MH
Dr. SUHARIZAL, SH, MH**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
2018**

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIVONIS PIDANA DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

(Sari Dewi, 1620112002, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 130 halaman, 2018)

ABSTRAK

PNS merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan. PNS dituntut untuk patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, seorang PNS yang divonis pidana juga harus diproses berdasarkan peraturan kepegawaian. Terdapat 12 orang PNS di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang divonis pidana dengan kasus yang berbeda, namun tidak semuanya dijatuhi hukuman disiplin. Permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS yang divonis pidana di Kabupaten Kepulauan Mentawai ? dan Mengapa sebagian PNS yang divonis pidana tidak dijatuhi hukuman disiplin? serta Bagaimanakah akibat hukum tidak dilakukannya penjatuhan hukuman disiplin terhadap status PNS yang divonis pidana dan terhadap pejabat yang berwenang atas PNS dimaksud ? Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif-Empiris yang bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian: *Pertama*, Penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS yang divonis pidana dilakukan oleh Bupati Kepulauan Mentawai berdasarkan rekomendasi dari MPP. Dari 12 PNS yang divonis pidana, hanya 5 orang PNS yang dijatuhi hukuman disiplin. *Kedua*, Sebagian PNS tidak dijatuhi hukuman disiplin dipengaruhi oleh: a. *faktor hukum*, yaitu tidak adanya regulasi di daerah sebagai pedoman teknis tentang tahapan, ukuran waktu dan pembagian wewenang dalam penjatuhan hukuman disiplin. b. *faktor penegak hukum*, meliputi eksistensi lembaga MPP yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat serta jumlah dan kompetensi anggota yang terbatas. c. *faktor sarana*, yang mempengaruhi kepastian dan kecepatan penanganan perkara. *Ketiga*, akibat hukum terhadap status PNS yang tidak dijatuhi hukuman disiplin adalah masih berstatus aktif dan menerima gaji penuh. Kondisi ini menyebabkan pembayaran gaji PNS yang divonis pidana tidak sesuai ketentuan. Terhadap pejabat yang berwenang atas PNS dimaksud, tidak ada ketentuan lebih lanjut terkait PPK yang tidak menjatuhkan hukuman disiplin. Disarankan agar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai membuat regulasi daerah dan menyesuaikan kelembagaan MPP serta meningkatkan kompetensi keanggotaannya. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga harus menyegerakan proses penjatuhan hukuman disiplin agar setiap PNS yang divonis pidana mendapatkan kepastian status kepegawaiannya, sehingga segala hak dan kewajiban yang melekat padanya dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Hukuman Disiplin, PNS, dan Pidana

**DISCIPLINARY PUNISHMENTS
FOR CIVIL SERVANTS CONVICTED OF CRIMINAL OFFENCES
IN MENTAWAI ISLANDS DISTRICT**

(Sari Dewi, 1620112002, Graduate Program of Law, Faculty of Law
Andalas University, 130 pages, 2018)

ABSTRACT

The Indonesian Public Service is a primary government actor in national development. Civil servants are required to obey and comply with the prevailing laws and regulations. Without prejudice to the provisions of criminal legislation, a civil servant who is convicted of a criminal offense must be processed under the rules of employment. There are 12 civil servants in Mentawai Islands District who have been convicted of different criminal offenses, but not all of them have received sentences. The problems studied in this research are: how the disciplinary punishment of civil servants convicted of criminal offenses in Mentawai Islands District is implemented? Why are some convicted civil servants not sentenced?, and What is the legal consequence of the imposition of disciplinary punishment on the status of civil servants who have been sentenced and to the authorized official over these civil servants?. This research used normative-empirical legal research methods which are descriptive analytical. The research results: *First*, the disciplinary punishment of criminal civil servants is decided by the mayor of Mentawai Islands District based on the recommendation of MPP. Of the 12 civil servants who were convicted, only 5 civil servants received disciplinary sentences. *Second*, some civil servants are not sentenced because of the influence of: a. *legal factors*, namely the absence of regulations in the region as technical guides on the steps, duration and distribution of authority in taking disciplinary action; b. *law enforcement factors*, including the existence of MPP institution which has no clear or strong legal basis and a limited number of members with limited competency; c. *facility factors* which influence the certainty and speed of handling cases. *Third*, the legal effect on a civil servant's status when they are not sentenced to discipline and remain active receiving full salary. This results in payment of convicted civil servants that is not in accordance with the provisions. Authorized officials over civil servants have no further provision regarding PPK to impose disciplinary punishment. It is suggested that the Government of the Mentawai Islands makes regional regulations, improve the MPP institution, and the competency of the membership. The Government of the Mentawai Islands needs to hasten the process of applying disciplinary punishment. So, every civil servant convicted of criminal offenses obtains certainty regarding his employment status. Then, all rights and obligations associated with his position can be accounted for under the applicable regulations.

Keywords: Disciplinary Punishment, Civil Servant, and Criminal Offences